

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian skripsi ini mengenai program dan inisiatif India di Teluk Benggala, pada periode ketika fokus negara Asia Selatan terbesar tersebut bergeser dari kepentingan maritim dan ekonomi menuju perlindungan lingkungan di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi, dapat dilihat bahwa diplomasi lingkungan sebagai alternatif dari kerangka keamanan tradisional menghasilkan dua hal sekaligus: kerja sama yang cukup bermakna dan tetap bertahannya kompetisi yang berorientasi negara. Diplomasi lingkungan memang meningkatkan kerja sama ilmiah dan respons bencana, tetapi tidak dapat menggantikan kerangka keamanan arus utama. Sengketa maritim dan rivalitas geopolitik tetap memengaruhi pilihan negara. Inisiatif terbaru, termasuk visi *climate-first* BIMSTEC dan perluasan program maritim India, menunjukkan pengakuan bahwa diplomasi lingkungan harus berjalan berdampingan dengan mekanisme keamanan tradisional, bukan menggantikannya.

Bay of Bengal Large Marine Ecosystem (BOBLME), misalnya, yang aktif dari 2009 hingga 2015 dan dihidupkan kembali sebagai BOBLME-2 untuk periode 2024–2028, menghasilkan kerangka ilmiah regional untuk pengelolaan perikanan berbasis ekosistem. Program ini juga membentuk komunitas epistemik yang terdiri atas ilmuwan dan pejabat yang memiliki kepentingan profesional lintas negara. Kelompok ini mengembangkan pemahaman bersama mengenai masalah seperti penangkapan ikan berlebih dan penurunan habitat, dan kerja sama mereka sesekali mengurangi ketegangan geopolitik. Meskipun ada kerja sama jangka panjang, negara-negara di Teluk Benggala tidak berhasil membentuk institusi regional yang kuat. *Strategic Action Programme* dari BOBLME-1 mengusulkan aturan mengikat terkait perikanan dan perlindungan habitat, tetapi implementasi nasional berbeda-beda. Banyak negara juga kekurangan sumber daya untuk menegakkan pembatasan penangkapan ikan atau mengelola kawasan konservasi laut. Diplomasi lingkungan pun tidak memiliki institusi supranasional, yang membuat penegakan lemah dan mencegah integrasi yang lebih dalam.

Environmental peacebuilding menjelaskan bahwa kerja sama menghadapi risiko ekologis bersama dapat membangun kepercayaan dan mengurangi konflik (Ide et al., 2021, hal. 6). Deklarasi BIMSTEC 2018 yang mempromosikan Teluk Benggala yang Damai, Makmur, dan Berkelanjutan mencoba membentuk identitas bersama tersebut. Doktrin SAGAR India juga memuat unsur *peacebuilding* dengan menyediakan barang publik regional seperti bantuan bencana dan sistem peringatan dini. Namun pendekatan ini menghadapi masalah depolitisasi, di mana bahasa teknis sering menyembunyikan konflik politik. Inisiatif perikanan kerap mengabaikan ketimpangan akses sumber daya. Nelayan kecil menghadapi lebih banyak pembatasan, sementara armada industri tetap diuntungkan. Kerja sama lingkungan juga tidak dapat menyelesaikan sengketa seperti konflik air Teesta antara India dan Bangladesh, yang menghambat pengelolaan Sundarbans.

Seperti yang sudah dianalisa, India menggunakan diplomasi lingkungan terutama sebagai bentuk *soft balancing*, membentuk struktur regional tanpa konfrontasi langsung (Narayanan, 2025, hal. 8). IPOI memberikan India peran utama dalam keamanan maritim dan manajemen bencana, menunjukkan hubungan antara kerja sama lingkungan dan kepentingan strategis. Infrastruktur seperti IFC-IOR dan *National Maritime Information Sharing Centres* memperkuat pemantauan lingkungan sekaligus memperluas kapabilitas keamanan maritim itu, tata kelola lingkungan melalui penerapan BOBLME-2 mendorong *ecosystem-approach fisheries management* (EAFM), dan komite perikanan berbasis komunitas di Indonesia dan Bangladesh telah meningkatkan regulasi dan perlindungan habitat. Akan tetapi, kelemahan tata kelola, seperti penegakan hukum yang lemah, kapasitas pemantauan yang tidak merata, serta tekanan pembangunan, menimbulkan kesenjangan besar dalam implementasi (BOBLME, 2015, hal. 48).

Teori *polycentric governance* memprediksi bahwa keberadaan banyak institusi yang saling tumpang tindih dapat memberi manfaat. Tetapi, di Teluk Benggala, kondisi ini justru menimbulkan fragmentasi. Banyak lembaga seperti BIMSTEC, IORA, BOBP-IGO, dan BOBLME melakukan duplikasi program dan menyebarkan sumber daya secara tidak efisien. Kurangnya koordinasi menghasilkan *institutional*

overlap dengan pendekatan yang tidak konsisten.

6.2 Saran

Persoalan paling mendasar yang berulang kali muncul dalam analisis adalah posisi komunitas pesisir sebagai objek perlindungan, bukan subjek pengambilan keputusan. Temuan bahwa hanya sebagian kecil komunitas pesisir pernah dilibatkan secara formal dalam konsultasi kebijakan, bahwa belasan ribu keluarga nelayan kehilangan akses ke wilayah tangkap tradisional tanpa pernah didengar dalam proses penilaian dampak, serta bahwa Rencana Aksi Nasional untuk konservasi hiu disusun dengan bahasa teknokratis yang justru mengeksklusi nelayan, menunjukkan bahwa partisipasi yang ada bersifat prosedural dan bukan substantif. Oleh karena itu, kerangka kerja sama lingkungan di Teluk Benggala perlu mensyaratkan keterlibatan serikat nelayan dan komunitas pesisir sejak tahap perumusan kebijakan, bukan sekadar tahap sosialisasi setelah keputusan diambil. Pengetahuan ekologis tradisional yang dimiliki komunitas yang telah menangkap ikan di perairan yang sama selama beberapa generasi justru harus diposisikan sebagai aset tawar, karena ia memuat informasi tentang pola migrasi dan lokasi pemijahan yang tidak tertangkap oleh survei ilmiah konvensional.

Kedua, analisis mengenai berbagi beban yang tidak proporsional perlu dijawab dengan mekanisme pembiayaan regional yang lebih adil. Penelitian ini menemukan bahwa proyek sebesar BOBLME sebagian besar dibiayai oleh donor eksternal, sementara India sebagai penyumbang lebih dari tujuh puluh persen PDB kawasan justru berkontribusi minimal namun mendominasi penetapan agenda. Pola serupa terlihat pada International Solar Alliance yang nyaris sepenuhnya bergantung pada pendanaan India sehingga keberlanjutannya menjadi tidak pasti. Konsekuensi logis dari temuan ini adalah perlunya formula kontribusi yang mengikat ukuran ekonomi suatu negara pada besaran tanggung jawab finansialnya, sehingga kepemimpinan agenda tidak lagi terlepas dari pemikulan biaya, dan negara-negara kecil tidak menanggung beban implementasi sumber daya manusia atas program yang arah kebijakannya ditentukan pihak lain.

Hal tersebut berkaitan langsung dengan kesenjangan antara retorika tingkat tinggi dan implementasi konkret, yang dalam penelitian ini terekam melalui rendahnya proporsi rencana aksi yang benar-benar dijalankan, lambannya pengesahan rencana konservasi, serta kebiasaan memperbarui nota kesepahaman yang belum menghasilkan keluaran substansial, menuntut peralihan dari instrumen yang bersifat sukarela menuju komitmen yang disertai tenggat waktu, indikator pemantauan yang terukur, dan mekanisme resolusi sengketa yang independen. Fakta bahwa sengketa air lintas batas dapat dibiarkan menggantung selama lebih dari empat dekade tanpa penyelesaian menegaskan bahwa tanpa mekanisme yang mengikat, isu yang sensitif secara politik akan selalu ditunda atau diencerkan.

Selain itu, ketegangan antara keamanan negara dan keamanan manusia yang terdokumentasi melalui dampak larangan penangkapan ikan musiman, di mana nelayan kecil kehilangan seluruh pendapatan dan terjerat utang sementara kapal pukat industri melanggar larangan di luar jangkauan patroli, mengharuskan setiap kebijakan konservasi disertai jaring pengaman sosial dan penegakan yang berdiferensiasi. Kewajiban memasang perangkat pemantauan yang biayanya melampaui pendapatan tahunan nelayan tradisional, sementara armada besar justru mampu mematikan perangkatnya, harus dikoreksi melalui subsidi teknologi bagi kapal kecil dan pengalihan sasaran penegakan kepada pelaku berskala besar. Demikian pula, temuan bahwa kurang dari lima persen pendapatan kredit karbon dari restorasi mangrove benar-benar sampai ke komunitas lokal menuntut jaminan pembagian manfaat yang tegas agar konservasi tidak berubah menjadi pengambilalihan ruang hidup.

Yang terakhir, asimetri kapasitas yang tampak dari timpangnya jumlah stasiun pemantauan kualitas air antara India dan tetangganya, yang memungkinkan praktik pemilihan forum sesuai kepentingan, perlu dijawab dengan penguatan kapasitas kolektif negara-negara kecil melalui pengumpulan sumber daya pemantauan bersama dan koordinasi posisi negosiasi. Pada saat yang sama, fragmentasi kelembagaan yang menyebabkan tumpang tindih dan inefisiensi sebaiknya

dirasionalisasi melalui pembagian mandat yang jelas, sementara prioritas diarahkan pada pengurangan polusi di sumbernya, mengingat besaran limbah industri dan sampah plastik yang masuk ke teluk jauh melampaui skala intervensi simbolik. Pengalaman proyek tungku masak berskala rumah tangga yang terbukti dapat diimplementasikan secara cepat menunjukkan bahwa pendekatan dari bawah lebih layak diperluas dibandingkan ketergantungan pada proyek besar, dan ukuran keberhasilan diplomasi lingkungan pada akhirnya bukanlah naiknya volume perdagangan, melainkan apakah komunitas paling rentan benar-benar menjadi lebih aman.